

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo sebagai Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.

LkjIP merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Pengukuran Kinerja.

Pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Purworejo dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja

**a. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum yang mendasari penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
16. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

### **C. PROFIL ORGANISASI DINKOMINFO KABUPATEN PURWOREJO**

- a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
  1. Kedudukan  
Dinkominfo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
  
  2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan persandian sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi komunikasi, dan persandian serta statistik dan teknologi informatika

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinkominfo, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian

- yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- f. Pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
  - h. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 4. Struktur Organisasi

##### 4.1 Susunan Organisasi

Susunan organisasi DINKOMINFO terdiri dari:

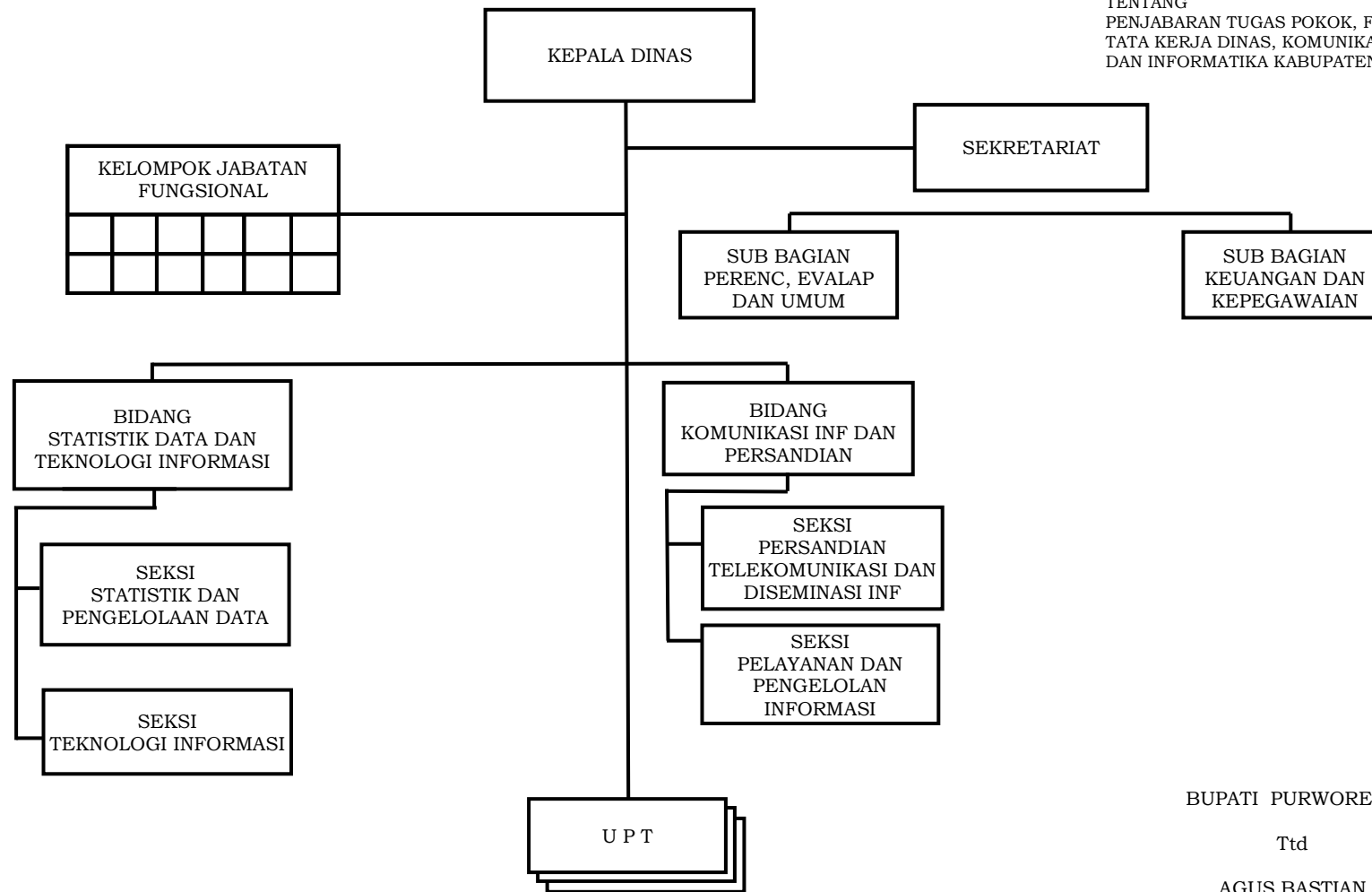
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum.
  - 2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian
  - 1) Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
  - 2) Seksi Persandian Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi
- d. Bidang Statistik Data dan Teknologi Informasi
  - 1) Seksi Statistik dan Pengelolaan Data
  - 2) Seksi Teknologi dan Informatika
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### 4.2 Bagan Organisasi

Bagan organisasi Dinkominfo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagaimana tampak dalam Gambar 1.1.

Gambar 2.1  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 (Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 14 Tahun 2016)

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR: 77 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
 TATA KERJA DINAS, KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO  
 Ttd  
 AGUS BASTIAN

### 4.3 Sumber Daya

#### a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan semua program kerja dan kegiatan Tahun 2019 DINKOMINFO Kabupaten Purworejo didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut:

#### **Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon I	JPT/ Es II b	Eselon III	Eselon IV	FFT/ JFU	Non PNS	Jml
1	Kepala Dinas							1
2	Sekretariat			1	2	7	2	12
3	Bidang Komunikasi Informasi dan Persandian			1	2	7	2	12
4	Bidang Statistik Data dan TI			1	2	6	10	19
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>43</b>

Sekretariat memiliki pejabat eselon dan karyawan sebanyak 12 orang. Sedangkan jumlah pejabat eselon dan karyawan pada Bidang Komunikasi Informasi dan Persandian sebanyak 12 orang berstatus PNS dan 2 orang non PNS. Bidang Statistik Data dan TI sebanyak 19 orang, 10 diantaranya merupakan non PNS sebagai tenaga TI .

**Kendala dalam ketersediaan SDM** yang menjadi isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo adalah mengenai kuantitas dan kualitas pegawai dengan latar belakang bidang Telekomunikasi, Komunikasi dan Informatika.

#### 1. Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo sejak bulan Juli 2018, menempati gedung bekas BPPKAD di kompleks Setda Purworejo. Beberapa perlengkapan penunjang kinerja yang sementara berada di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

## Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jml	Keterangan
1	2	3	4
1	Portable Generating Set	2	
2	Station Wagon	3	Operasional Dinas
3	Sepeda Motor	8	Operasional Dinas
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	
5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	
6	Lemari Besi	2	
7	Rak Besi/Metal	60	
8	Rak Kayu	2	Usul RB 2019
9	Filling Besi/Metal	14	Usul RB 2019
10	Band Kas	1	
11	Lemari Sorok	1	
12	Lemari Kaca	1	
13	Lemari kayu	10	
14	Papan Visuil	1	
15	Papan Pengumuman	2	Usul RB 2019
16	Papan Tulis	2	
17	<b>Papan Tulis</b>	<b>1</b>	<b>(Ek)</b>
18	White Board	6	
19	Peta	1	
20	Mesin Absensi	2	
21	Overhead Projektor	4	Usul RB 2019
22	<b>Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)</b>	<b>1</b>	<b>(Ek)</b>
23	Lemari Kayu	1	
24	Meja Besi/Metal	3	
25	Meja Kayu/Rotan	5	
26	Meja Kayu/Rotan	10	
27	Kursi Besi/Metal	18	
28	<b>Kursi Kayu/Rotan/Bambu</b>	<b>39</b>	<b>Sebagian rusak berat</b>
29	Zice	5	
30	Meja Rapat	12	
31	Meja Tulis	29	Sebagian rusak berat
32	<b>Meja Telpon</b>	<b>1</b>	<b>(Ek)</b>
33	Meja Tambahan	1	
34	Meja Panjang	2	<b>(Ek) Usul RB 2019</b>
35	Kursi Rapat	141	Sebagian rusak berat
36	Kursi Tamu	4	
37	<b>Kursi Tangan</b>	<b>2</b>	<b>(Ek)</b>
38	Kursi Putar	72	Sebagian rusak berat
39	Kursi Biasa	13	Sebagian rusak berat
40	Meja Komputer	57	Usul RB 2019
41	Meja Biro	3	
42	<b>Kursi Plastik</b>	<b>45</b>	<b>(Ek)</b>
43	<b>Jam Mekanis</b>	<b>4</b>	<b>(Ek)</b>
44	Mesin Penghisap Debu	1	
45	AC Unit	6	
46	AC Split	10	
47	Kipas Angin	2	Usul RB 2019
48	Kompur Gas	1	
49	Alat Dapur Lainnya	1	



50	<b>Alat Dapur Lainnya</b>	<b>1</b>	<b>(Ek) Usul RB 2019</b>
51	Tabung Gas	2	
52	Treng Air	1	Usulan Mutasi antar OPD ke SKPKD (menyatu dengan gedung lama sebelah selatan)
53	Televisi	5	
54	Cassette Recorder	1	
55	Loudspeaker	2	
56	Wireless	47	
57	Microphone	6	
58	Microphone Floor Stand	4	
59	Stabilisator	3	
60	Lambang Garuda Pancasila	2	
61	Tiang Bendera	1	Depan Bekas PDE
62	Dispenser	3	
63	Mimbar/Podium	1	
64	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	
65	Alat Pemadam Portable	2	
66	Pipa Pemancar	1	
67	P.C Unit	107	Sebagian rusak berat
68	Lap Top	19	
69	CPU	4	Usul RB 2019
70	Hard Disk	7	
71	<b>Keyboard</b>	<b>2</b>	<b>(Ek) Usul RB 2019</b>
72	Printer	4	1 rusak berat
73	CPU	6	Usul RB 2019
74	Monitor	8	Usul RB 2019
75	Monitor	4	
76	Printer	5	
77	Server	6	
78	Router	31	
79	Hub	30	
80	Modem	2	Usul RB 2019
81	Peralatan Jaringan Lain-lain	393	
82	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	
83	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	
85	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	
86	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	
87	Proyektor + Attachment	1	Usul RB 2019
88	Audio Distribution	1	
89	Equalizer	2	
90	Audio Limiter	1	
91	Headphone	11	
92	Microphone/Wireless Mic	1	
93	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	
94	Audio Cassete Recorder	1	
95	Digital Audio Tape Recorder	2	
96	Peralatan studio Visual Lain-lain	35	
97	Video Tape Recorder Portable	2	
98	Camera Wall Box	4	
99	Layar Film	1	
100	Alti Meter	2	
101	Microphone	13	
102	Sound System	9	

103	Pesawat Telephone	11	Usul RB 2019
104	Facsimile	2	Usul RB 2019
105	Alat Komunikasi Lain-lain	63	Sebagian rusak berat
106	Wireless Amplifier	1	
107	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	3	
108	Unit Pemancar VHF/FM Portable	2	
109	Antena VHF/FM Portable	1	
110	Peralatan Antena UHF Lain-lain	3	
111	Antena SHF/Parabola Portable	1	
112	Switcher Manual	3	
113	Switchwe Antena Lain-lain	3	Usul RB 2019
114	Receiver STL/VHF (FM)	2	
115	Audio Processor	1	
116	Swicher/Patch Panel	1	
117	Power Distribution Board	1	
118	Tools	1	
119	Alat Pemadam Kebakaran	2	
120	Fibertec System	3	
121	Fotovol (Sel Surya)	1	
122	Tripod	1	
123	Laser Lain-lain	2	

Pemerintah Kabupaten Purworejo memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga relative belum memadai.

Permasalahan pada masalah terbatasnya asset, sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, maupun keberadaan sebagian peralatan penunjang pekerjaan yang masih dalam masa peralihan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk (arsip).

#### **D. ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, maka dapat dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

Urusan Komunikasi dan informatika

1. Belum optimalnya pemanfaatan media informasi.
2. Belum adanya integrasi system informasi berbasis Teknologi Informasi yang dimiliki pemerintah daerah.
3. Masih terlambatnya Time Release dan tingkat akurasi data
4. Masih lemahnya data sektoral pada Perangkat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah
6. Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju Good Governance

## **E. SISTEMATIKA**

1. Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Profil Organisasi, Isu strategis, dan Sistematika Penulisan LKjIP.
2. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Capaian Prestasi dan Penghargaan
4. Bab IV Penutup berisi tentang uraian simpulan umum atas capaian kinerja dan Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
5. Lampiran – lampiran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS (RPJMD) 2017-2021**

Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 ayat (3), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD merupakan janji politik Kepala Daerah terpilih dan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2017 – 2021.

##### **2.1.1. Pernyataan Visi Bupati Purworejo**

Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

##### **2.1.2. Pernyataan Misi Bupati Purworejo**

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis;
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan;
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya dan olahraga;
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan;

6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik;
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Untuk Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD terdiri dari Indikator Sasaran dan Indikator Program berikut target capaian setiap tahunnya. Dan Indikator Kinerja Sasaran juga merupakan Indikator Kinerja Utama.

#### **Indikator Kinerja PERANGKAT DAERAH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran / Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prosentase Perangkat Daerah memiliki website yang interaktif	<b>78%</b>	94%	95%	95%	96%	96%	96%	<b>100%</b>
	Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
2	Cakupan layanan cybercity	<b>0%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	Cakupan layanan Teknologi Informasi	<b>0%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
3	Cakupan layanan Sistem Informasi Desa	<b>0%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>

	Cakupan layanan Teknologi Informasi	<b>0%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
4	Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	<b>86%</b>	89%	92%	95%	98%	100%	100%	<b>100%</b>
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan	<b>59%</b>	68%	77%	77%	78%	79%	80%	<b>100%</b>
	Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
5	Cakupan ketersediaan statistik sektoral dan daerah	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
6	Cakupan layanan komunikasi publik	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
7	Cakupan layanan persandian	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
8	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>

	Prosentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>

#### 2.1.4 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusun program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Dalam menjabarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo di tahun 2018 menetapkan program-program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000
		2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.236.500
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.500.000
		4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.144.200
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.240.000
		6. Penyediaan Makanan dan Minuman	50.700.500
		7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	80.000.000
		8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	9.000.000
		9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.999.500
		10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.600.000
		11. Pengelolaan	2.940.000



		dan Penataan Arsip	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	38.403.900
		2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000
		3. Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	79.812.943
		4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	19.995.000
		5. Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	8.648.500
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.720.000
		2. Pengembangan dan Peningkatan SDM	68.238.100
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan	40.000.000
		2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	50.000.000
5.	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	1. Penyusunan Data Dasar Pembangunan	20.000.000
6.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Diseminasi Kelompok Informasi Masyarakat	28.000.000
		2. Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	52.514.400
		3. Pelayanan Sistem Data Elektronik	3.007.078.300
		4. Forum Komunikasi Media Tradisional	107.199.400
		5. Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	74.300.000
		6. Optimalisasi Pelaksanaan e_Government	421.446.000

		7. Pengembangan Smart City	5.907.129.700
		8. Pengendalian Jasa Warung Internet (warnet)	23.820.000
		9. Fasilitasi PPID	168.096.800
7.	Penyusunan Statistik	1. Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo	90.750.000
		2. Penyusunan Statistik Ekonomi Kabupaten Purworejo	75.000.000
		3. Penyusunan Statistik Sosial Kabupaten Purworejo	35.000.000
		4. Supervisi dan Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten	86.304.000
		5. Pusat Layanan Statistik dan Data Kabupaten Purworejo	52.946.000
8.	Penyelenggaraan Persandian	1. Pelayanan dan Penyediaan Jasa Persandian	43.085.000
9.	Pelayanan Komunikasi Publik	1. Forum Komunikasi Citical Voice Point	595.908.700
		2. Media Center	26.857.200

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo termuat dalam lampiran.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PERUBAHAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURWOREJO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi	Persentase keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi	100%
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	100%

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 234.210.700,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 226.860.343,00
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 74.958.100,00
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 90.000.000,00
5. Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Rp 20.000.000,00
6. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 9.789.583.600,00
7. Penyusunan Statistik	Rp 340.000.000,00
8. Penyelenggaraan Persandian	Rp 43.085.000,00
9. Pelayanan Komunikasi Publik	Rp. 622.765.900,00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja program yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Infomatika tahun 2019.

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Jenis data (Indikator kinerja beserta faktor penghitungnya)	2018	2019			Target s.d tahun 2018	Ket
			Kondisi s.d Okt	Perkiraan s.d akhir Des	Kondisi s.d Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah memiliki website yang interaktif	93%	90%	100%	100%	97%	
2	Cakupan layanan cyber city	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Cakupan layanan Sistem Informasi Desa	43%					
4	Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	95%	95%	100%	95%	
5	Persentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Cakupan layanan Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan	100%	86%	86%	100%	86%	
9	Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Tingkat ketersediaan data statistik sektoral dan daerah yang akurat	100%	78%	100%	100%	100%	
11	Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral	100%	0%	100%	100%	100%	
12	Cakupan layanan pengamanan informasi persandian	100%	0%	100%	100%	100%	

## 2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo diantaranya :

- a. Kualitas sumber daya manusia (aparatur dengan basic pendidikan/keahlian Teknologi Informasi dan komunikasi);
- b. Peningkatan sarana dan prasara yang bermutu dan tepat fungsi di setiap unit kerja;
- c. Pengembangan unit layanan informasi publik;
- d. Komitmen dan dukungan penentu kebijakan terkait prasarana layanan informasi kepada publik.

Dari faktor penentu tersebut ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo diantaranya :

- a. Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik yang mudah diakses baik secara elektronik maupun non elektronik;
- b. Adanya program nasional terkait bidang teknologi informasi dan Komunikasi yang mewajibkan semua kabupaten kota untuk mewujudkannya pengembangan Smart City dan Penerapan E government;
- c. Terbukanya kesempatan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Pusat (APBN) terkait pengembangan teknologi informasi dan Komunikasi;
- d. Adanya program Indonesia Satu Data yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mendukung program tersebut dalam rangka pengambilan kebijakan.

Beberapa Kendala dalam pencapaian tujuan diantaranya :

- a. Sarana mobilitas untuk pelaksanaan publikasi keliling Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo masih menggunakan kendaraan yang sudah tidak layak.
- b. Kegiatan Fasilitasi PPID di tahun 2019 tidak didukung anggaran
- c. Dari segi penganggaran masih dirasakan kurang untuk mewujudkan Purworejo Smart City (seperti perwujudan Command Center, Lab ICT dan Data Center)

## B. REALISASI ANGGARAN

### Pagu dan Realisasi Anggaran

#### Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo

No	Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Ket.
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.789.583.600	9.276.945.861	94.76%	
1.	Forum Komunikasi Media Tradisional	107.199.400	105.782.100	98,68%	
2.	Pengendalian Jasa Warung Internet (Warnet)	23.820.000	22.552.600	94,68%	
3.	Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	52.513.400	52.379.964	99,75%	
4.	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	74.300.000	70.245.400	94.54%	
5.	Pelayanan Sistem Data Elektronik	3.007.078.300	2.840.502.005	94.46%	
6.	Pengembangan Smart City	5.907.129.700	5.594.218.372	94.70%	
7.	Optimalisasi Pelaksanaan e_Government	421.446.000	416.821.620	98.70%	
8.	Fasilitasi PPID	168.096.800	146.723.900	87.29%	
9.	Diseminasi Kelompok Informasi Masyarakat	28.000.000	27.719.900	99.00%	
II.	Program Penyelenggaraan Persandian	43.085.000	41.446.490	96.20%	
1.	Pelayanan dan Penyediaan Jasa Persandian	43.085.000	30.326.000	96.20%	
III.	Program Penyusunan Statistik	340.000.000	334.966.987	98.52%	
1.	Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo	90.750.000	90.530.200	99.76%	
2.	Penyusunan Statistik Ekonomi Kabupaten	75.000.000	74.778.775	99.71%	
3.	Penyusunan Statistik Sosial Kabupaten	35.000.000	34.462.875	98.47%	
4.	Supervisi dan Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten	86.304.000	85.503.137	99.07%	
5.	Pusat Layanan Statistik dan Data Kabupaten Purworejo	52.946.000	49.692.000	93.85%	
VI	Program Pelayanan Komunikasi Publik	622.765.900	530.542.333	84.73%	
1.	Forum Komunikasi Critical Voice Point	595.908.700	504.932.833	84.73%	
2.	Media Center	26.857.200	25.609.500	95.35%	

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 melaksanakan 9 Program dan 38 Kegiatan termasuk didalamnya Kegiatan Non Urusan

dengan pagu anggaran Rp. 11.441.463,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.785.937.646,00 atau 94.27%

Secara umum dari semua kegiatan yang dilaksanakan telah tercapai fisiknya, hanya untuk beberapa kegiatan kinerja anggaran tidak dapat terserap 100% karena beberapa hal, antara lain : Sisa Anggaran sebagian besar disebabkan oleh:

- a. Pengadaan barang/ jasa menyesuaikan harga di pasaran
- b. Pembayaran Rekening sesuai dengan kebutuhan.

### **C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dinas Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran, sehingga diharapkan seluruh kegiatan dapat terselesaikan sesuai rencana.

### **D. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo telah menunjukkan kinerja yang baik.

Salah satunya dengan telah dibangunnya Command Center sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan Purworejo Smartcity , yang sudah mulai diupayakan pencapaiannya sejak diberlakukannya Perda No. 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2021.

Melalui Command Center ini maka sinergitas dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dapat lebih cepat terjalin , pengambilan keputusan lebih cepat, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dapat makin meningkat efisiensi dan efektivitasnya

Saat ini semua Perangkat Daerah telah terhubung dalam jaringan intra pemerintah daerah melalui teknologi kabel fiber optic.

Dalam hal pelayanan public terdapat 47 titik free hotspot area public

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN UMUM**

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berhasil cukup baik.

#### **B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA**

1. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja didorong beberapa faktor dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan baik pembinaan maupun pelatihan sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi.
2. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan serta tingginya jumlah pelanggaran UU ITE , terbatasnya SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, kesadaran masyarakat yang belum berimbang dengan laju perkembangan teknologi, serta sarana dan prasarana umum

#### **C. TINDAK LANJUT**

1. Dalam upaya mengatasi kendala telah diusulkan peningkatan SDM melalui Diklat-diklat.
2. Mengusulkan kegiatan penyusunan data base pada masing-masing bidang sehingga memudahkan dalam pembuatan perencanaan.
3. Memenuhi perangkat lunak dan perangkat keras untuk meningkatkan kinerja

Demikian semoga laporan kinerja ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi langkah-langkah yang akan ditempuh guna perbaikan kinerja yang lebih baik.

Purworejo, Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Purworejo



**STEPHANUS AAN ISA N, SSTP, M. Si**  
Pembina

NIP. 196810528 199912 1 001